Tantangan Ketidaksetaraan Sosial Ekonomi Menuju Transformasi Sistem Pangan Berkelanjutan

The Challenges Of Socioeconomic Inequities Towards Sustainable Food System Transformation

Rini Prastyanty, S.TP
Mahasiswa Pasca Sarjana
Program Magister Teknologi Pangan
Fakultas Teknologi Pertanian IPB University

Sistem pangan berkelanjutan adalah sistem pangan yang memungkinkan keamanan pangan, ketahanan pangan dan gizi untuk generasi sekarang dan mendatang meliputi tiga dimensi (ekonomi, sosial dan lingkungan) yaitu menguntungkan secara keseluruhan (keberlanjutan ekonomi), memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat (keberlanjutan sosial) dan memiliki dampak positif atau netral terhadap lingkungan alam (kelestarian lingkungan).

Sistem pangan berkelanjutan merupakan inti dari Sustainable Development Goals (SDGs). Diadopsi pada tahun 2015, SDGs menyerukan transformasi besar dalam sistem pertanian dan pangan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi pada tahun 2030. Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak dihadapi memiliki tantangan yang kompleks dan sistemik yang membutuhkan kombinasi tindakan yang saling berhubungan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Berdasarkan laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) edisi 2022 menunjukkan gambaran yang suram terkait data-data sebagai berikut:

1. Sebanyak 828 juta orang terkena dampak kelaparan pada tahun 2021 (46 juta orang lebih

A sustainable food system is a food system that enables food security, food security, and nutrition for current and future generations following the three dimensions (economic, social, and environmental). It is profitable throughout (economic sustainability), It has broad-based benefits for society (social sustainability), and It has a positive or neutral impact on the natural environment (environmental sustainability).

A sustainable food system lies at the heart of the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). Adopted in 2015, the SDGs call for significant transformations in agriculture and food systems to end hunger, achieve food security and improve nutrition by 2030. To realize the SDGs, the global food system needs to be reshaped to be more productive, inclusive of poor and marginalized populations, environmentally sustainable and resilient, and able to deliver healthy and nutritious diets to all. These complex and systemic challenges require the combination of interconnected actions at the local, national, regional, and global levels.

Based on The 2022 edition of The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) report presents updates on the food security and nutrition situation around the world. The data paint a grim picture:

banyak dari tahun 2020 dan 150 juta lebih dari tahun 2019).

2. Sekitar 2,3 miliar orang di dunia (29,3 persen) mengalami kerawanan pangan sedang atau parah pada tahun 2021 (350 juta lebih banyak dibandingkan sebelum pecahnya pandemi COVID 19). Hampir 924 juta orang (11,7 persen dari populasi global) menghadapi kerawanan pangan pada tingkat yang parah, meningkat 207 juta dalam dua tahun.
3. Kesenjangan gender dalam kerawanan pangan terus meningkat pada tahun 2021 (31,9 persen wanita di dunia mengalami kerawanan pangan sedang atau parah, dibandingkan dengan 27,6 persen pria), kesenjangan lebih dari 4 poin persentase, dibandingkan dengan 3 poin persentase pada tahun 2020.
4. Hampir 3,1 miliar orang tidak mampu membeli makanan bergizi pada tahun 2020, naik 112 juta dari tahun 2019, yang mencerminkan dampak inflasi harga pangan konsumen yang berasal dari dampak ekonomi pandemi COVID-19 dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.
5. Diperkirakan 45 juta anak di bawah usia lima tahun menderita wasting, bentuk malnutrisi paling mematikan, yang meningkatkan risiko kematian anak hingga 12 kali lipat. Selain itu, 149 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat karena kekurangan gizi esensial yang kronis dalam makanan mereka, sementara 39 juta lainnya kelebihan berat badan.

Ke depan, diproyeksikan bahwa hampir 670 juta orang (8 persen dari populasi dunia) masih akan menghadapi kelaparan pada tahun 2030, bahkan jika pemulihan ekonomi global dipertimbangkan.

Ketidaksetaraan sosial ekonomi secara global menambah beban malnutrisi

Ketimpangan sosial ekonomi dikaitkan dengan malnutrisi yang meluas di berbagai negara. Selain ketidaksetaraan pada tingkat pendapatan, maka perhatian saat ini harus diperluas terkait ketimpangan

1. *As many as 828 million people were affected by hunger in 2021 – 46 million people more than a year earlier and 150 million more from 2019.*
2. *Around 2.3 billion people in the world (29.3 percent) were moderately or severely food insecure in 2021 – 350 million more compared to before the outbreak of the COVID-19 pandemic. Nearly 924 million people (11.7 percent of the global population) faced food insecurity at severe levels, an increase of 207 million in two years.*
3. *The gender gap in food insecurity continued to rise in 2021 - 31.9 percent of women worldwide were moderately or severely food insecure, compared to 27.6 percent of men – a gap of more than four percentage points, compared with three percentage points in 2020.*
4. *Almost 3.1 billion people could not afford a healthy diet in 2020, up 112 million from 2019, reflecting the effects of inflation in consumer food prices stemming from the economic impacts of the COVID-19 pandemic and the measures put in place to contain it.*
5. *An estimated 45 million children under five were suffering from wasting, the deadliest form of malnutrition, which increases children's risk of death by up to 12 times. Furthermore, 149 million children under five had stunted growth and development due to a chronic lack of essential nutrients in their diets, while 39 million were overweight.*
6. *Progress is being made on exclusive breastfeeding, with nearly 44 percent of infants under six months of age being exclusively breastfed worldwide in 2020. This is still short of the 50 percent target by 2030. Of great concern, two in three children are not fed the minimum diverse diet they need to grow and develop to their full potential.*

The projections are that nearly 670 million people (8 percent of the world population) will still face

sosial dan ekonomi, hal tersebut berdampak lebih besar pada malnutrisi dibandingkan guncangan pangan (misalnya adanya gagal panen karena kejadian ekstrim seperti bencana alam, pandemi, atau konflik).

Kondisi ketidaksetaraan dapat terjadi karena tidak meratanya distribusi sumber daya dan peluang, ketidakterwakilan dalam representasi dan partisipasi serta ketidakadilan sosial yang berkelanjutan seperti rasisme dan kolonialisme.

Diskriminasi dalam akses layanan kesehatan atau keamanan pangan, jaring/bantuan sosial, pendidikan, mata pencaharian akan dihadapi oleh kelompok sosial ekonomi tertentu. Ketidaksetaraan juga disebabkan karena ketidakadilan sosial yang fundamental, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk di berbagai negara seperti rasisme, kastaisme dan patriarki.

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Menghadapai Triple Burden Malnutrition di Indonesia

Masalah Triple Burden Malnutrition yaitu stunting, wasting dan obesitas serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia, yang dihadapi Indonesia saat ini menempatkan pembangunan bidang pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting pada balita 21,6%, wasting 7,7%, underweight 17,1 %, overweight 3,5 %, anemia pada ibu hamil 48,9% (Riskesdas, 2018). Di hulu, pertanian menjadi sektor kunci untuk mewujudkan status gizi masyarakat yang optimal, tetapi penting untuk memahami interaksinya dengan sektor lain seperti pola asuh, sanitasi dan air bersih, kualitas pelayanan kesehatan, serta sosial inklusi yang memiliki peran penting seperti: kemiskinan, pendidikan, budaya, gender, agama, usia, suku, disabilitas, infrastruktur, teknologi dan industri, dsb. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-determinan tersebut perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan menjadi tantangan baru pemerintah dalam pencapaian

hunger in 2030 – even if a global economic recovery is considered. This is similar to 2015, when the goal of ending hunger, food insecurity, and malnutrition was launched under the 2030 Agenda for Sustainable Development by the end of this decade.

Socioeconomic inequities are associated with malnutrition in many countries.

In addition to inequality in income levels, attention should now be extended to socioeconomic inequities, which have a more significant impact on vulnerability to food shocks (i.e., loss of a crop due to an extreme event such as a climate disaster, pandemic, or conflict).

Inequality can occur due to the unequal distribution of resources and opportunities, exclusion from representation and participation, and ongoing social injustices that are both personal and geopolitical such as racism and colonialism.

Discrimination in accessing health services or food safety nets/social assistance faced by disadvantaged socioeconomic groups. Inequities also stem from fundamental social injustice, which can take different forms in different countries: racism, casteism, patriarchy, and ableism

National Action Plan for Food and Nutrition Against Triple Burden Malnutrition in Indonesia

The Triple Burden Malnutrition problem, namely stunting, wasting, and obesity, as well as micronutrient deficiencies such as anemia, which Indonesia currently faces, has placed development in the food and nutrition sector as one of the government's priorities.

Based on The Results Indonesia Nutrition Status Survey (SSGI) in 2022, the prevalence of stunting in toddlers at 21,6%, wasting at 7,7%, underweight at 17,1%, overweight at 3,5%, anemia in pregnant women at 48,9% (Riskesdas, 2018). Upstream, agriculture is a crucial sector for realizing optimal community nutritional status. Still, it is essential to

SDGs terutama tujuan ke-2 yaitu tanpa kelaparan. Dampak paling signifikan adalah melemahnya sistem ketahanan pangan dan sistem kesehatan yang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan akses dan menurunnya kualitas layanan kesehatan dan gizi.

Menimbang determinan permasalahan pangan dan gizi yang multidimensi, dibutuhkan instrumen yang dipedomani pemerintah dan pemangku dalam melakukan kegiatan koordinasi. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting yang tengah gencar dilaksanakan untuk mengejar target RPJMN penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14,0% pada tahun 2024. RAN-PG juga akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun strategi dan aksi penajaman RAN-PG 2021-2024 yang diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan undernuritions (stunting, wasting, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular, melalui:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam,

understand its interactions with other sectors such as parenting, sanitation and clean water, quality of health services, and social inclusion which have essential roles such as poverty, education, culture, gender, religion, age, ethnicity, disability, infrastructure, technology, and industry, etc. Therefore, all sectors related to these determinants need to be integrated to achieve food and nutrition security

In addition, the impact of the COVID-19 pandemic on efforts to improve nutrition and health is a new challenge for the government in achieving the SDGs, especially the second goal, namely zero hunger. The most significant impact is the weakening of the food security and health systems, which causes widening inequalities in access and decreases the quality of health and nutrition services.

They are considering the multidimensional determinants of food and nutrition issues, an instrument that the government guides and stakeholders need to carry out coordination activities. The National Action Plan for Food and Nutrition (RAN-PG) is an essential instrument for integrating development activities in the food and nutrition sector at the central and regional levels starting from planning, implementing, monitoring, and evaluating, including convergence efforts to reduce stunting, which are currently being intensively implemented to pursue the RPJMN target of reducing the prevalence of stunting in children under five to 14.0% in 2024. RAN-PG also will be used by the regional government in preparing the Regional Action Plan for Food and Nutrition (RAD-PG) with the same principles and approaches in designing the sharpening action.

The World Health Organization (WHO) and the World Food Organization (FAO) recommend integrating food systems and orientation toward providing sustainable, nutritious food at the household level. Six actions can be taken, namely: (1) A solid and sustainable food system for the consumption of nutritious food; (2) integration of food and health systems to guarantee access to essential services; (3) social security and nutrition education; (4) Investment for nutrition improvement; (5) a safe

Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA.
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial)
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

Untuk mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat global, maka sistem pangan perlu bertransformasi menjadi lebih produktif, lebih inklusif bagi masyarakat miskin dan marginal, berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan, serta mampu memberikan pola makan yang sehat dan bergizi untuk semua umat manusia. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi tahun 2021-2024 yang melibatkan K/L terkait, antara Pemerintah Pusat, Daerah, Akademisi dan stakeholders lainnya. Rencana aksi ini diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan undernuritions (stunting, wasting, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular. (rpr)

and supportive environment for the fulfillment of nutrition for all targets; (6) Strengthening the governance and accountability of the food and nutrition system.

Based on these recommendations, strategies, and actions have been developed to refine the RAN-PG 2021-2024, which are expected to be able to increase B2SA food intake and utilization of nutrition services, which in turn can reduce undernutrition (stunting, wasting, lack of micronutrients) and control non-communicable diseases, through:

1. *Increasing the Availability of Diverse, Balanced Nutritious, and Food Safety (B2SA).*
2. *Increasing B2SA Food Affordability.*
3. *Increasing Utilization of B2SA Food and Nutrition Services (Essential).*
4. *Institutional Strengthening and Management of Food and Nutrition.*

To realize a sustainable food system to end hunger, achieve food security, and improve nutrition for the global community, the food system needs to be transformed to become more productive, more inclusive of the poor and marginalized, sustainable and friendly to the environment, and capable of providing a healthy diet. And nutritious for all humanity.

The National Action Plan for Food and Nutrition for 2021-2024 involves the relevant Ministries/ Institutions, between the Central Government, Regional Governments, Academics, and other stakeholders. This action plan is expected to increase the intake of Diverse, Balanced, Nutritious, and Food Safety (B2SA) food and the utilization of nutrition services, which in turn can reduce undernutrition. (stunting, wasting, lack of micronutrients) as well as controlling non-communicable diseases.(tr-rpr)